

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Pemuda

a. Pengertian pemberdayaan

Definisi pemberdayaan dalam arti sempit, yang berkaitan dengan sistem pengajaran antara lain dikemukakan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "*empower*" mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable* . dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) ataupun pengetahuan (*knowledge*). Seseorang tokoh pendidikan Paulo Freire, berpendapat bahwa pendidikan seharusnya dapat memberdayakan dan membebaskan para peserta didiknya, karena dapat mendengarkan suara dari peserta didik. Yang dimaksud suara adalah

segala aspirasi maupun segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut.

Pranaka dan Moeljanto menjelaskan konsep pemberdayaan (*empowerment*) dilihat dari perkembangan konsep dan pengertian yang disajikan dalam beberapa catatan kepustakaan, dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman konsep dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat. Perlu upaya mengaktualisasikan konsep pemberdayaan tersebut sesuai dengan alam pikiran dan kebudayaan Indonesia. Namun *empowerment* hanya akan mempunyai arti kalau proses pemberdayaan menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan, sebaliknya menjadi hal yang destruktif bagi proses aktualisasi dan koaktualisasi aksestensi manusia.

Pada intinya pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya. (Onny S. Priyono dan A.M.W Pranaka, 1996: 2-8)

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (afektif, kognitif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan-keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut. (Ambar Teguh S, 2004:80-81)

c. Tahap-tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodingningrat (2004:41) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

3) Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mehantarkan pada kemandirian. (Ambar Teguh S, 2004:82-83)

d. Sasaran pemberdayaan

Perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Schumacher memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail jauh lebih tepat daripada memberikan ikan”. (Ambar Teguh S, 2004:90)

e. Pendekatan Pemberdayaan

Akibat dari pemahaman hakikat pemberdayaan yang berbeda-beda, maka lahirlah dua sudut pandang yang bersifat kontradiktif, kedua sudut pandang tersebut memberikan implikasi atas pendekatan yang berbeda pula di dalam melakukan langkah pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang pertama memahami pemberdayaan sebagai suatu sudut pandang konfliktual. Munculnya cara pandang tersebut didasarkan pada perspektif konflik antara pihak yang memiliki daya atau kekuatan di satu sisi, yang berhadapan dengan pihak yang lemah di sisi lainnya. Pendapat ini diwarnai oleh pemahaman bahwa kedua pihak yang berhadapan tersebut sebagai suatu fenomena kompetisi untuk mendapatkan daya,

yaitu pihak yang kuat berhadapan dengan kelompok lemah. Penuturan yang lebih simpel dapat disampaikan, bahwa proses pemberian daya kepada kelompok lemah berakibat pada berkurangnya daya kelompok lain. Sudut ini lebih di pandang populer dengan istilah *zero-sum*.

Pandangan kedua bertentangan dengan pandangan pertama. Jika pada pihak yang berkuasa, maka sudut pandang kedua berpegang pada prinsip sebaliknya. Maka terjadi proses pemberdayaan dari yang berkuasa/berdaya kepada pihak yang lemah justru akan memperkuat daya pihak pertama. Dengan demikian kekhawatiran yang terjadi pada sudut pandang kedua. Pemberi daya akan memperoleh manfaat positif berupa peningkatan daya apabila melakukan proses pemberdayaan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu keyakinan yang dimiliki oleh sudut pandang ini adannya penekanan aspek generative. Sudut pandang demikian ini populer dengan nama *positive-sum* (Ambar Teguh S, 2004:91)

f. Pengertian Pemuda

Pemuda adalah golongan manusia-manusia muda yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah yang lebih baik, agar dapat melanjutkan dan mengisi pengembangan yang kini telah berlangsung. Pemuda Indonesia dewasa ini sangat beraneka ragam, terutama bila dikaitkan dengan kesempatan pendidikan. Keragaman

tersebut pada dasarnya tidak mengakibatkan perbedaan dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda.

Kedudukan pemuda dalam masyarakat adalah sebagai mahluk moral, mahluk sosial. Artinya beretika, bersusila, dijadikan sebagai barometer moral kehidupan bangsa dan pengoreksi. Sebagai mahluk sosial artinya pemuda tidak dapat berdiri sendiri, hidup bersama-sama, dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma, kepribadian, dan pandangan hidup yang dianut masyarakat. Sebagai makhluk individual artinya tidak melakukan kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi disertai ras tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap Tuhan Yang maha Esa.

Secara hukum pemuda adalah manusia yang berusia 15 – 30 tahun, secara biologis yaitu manusia yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan seperti adanya perubahan fisik, dan secara agama adalah manusia yang sudah memasuki fase aqil baligh yang ditandai dengan mimpi basah dan keluarnya darah haid bagi wanita.

Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial. Kedudukannya yang strategis sebagai penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya.

(Mukhlis Muchad F. 2007 diakses 12 Januari 2012)

g. Pengertian Pemberdayaan Pemuda

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Di mana pemuda itu memiliki beragam potensi yang dimiliki oleh individu pemuda itu sendiri. Sehingga pemuda identik sebagai sosok yang berusia produktif dan mempunyai karakter khas yang spesifik yaitu revolusioner, optimis, berfikir maju, memiliki moralitas, dsb. Kelemahan mencolok dari pemuda adalah control diri dalam artian mudah emosional, sedangkan kelebihan pemuda yang menonjol adalah mau menghadapi perubahan, baik perubahan kultural maupun perubahan sosial dengan menjadi pelopor perubahan itu sendiri.

2. Proses Rehabilitasi

Pemakai atau pecandu narkoba biasanya terganggu atau menderita secara fisik (penyakit), mental (perilaku salah), spiritual (kekacauan nilai-nilai hidup), dan sosial (rusak komunikasi). Biasanya hal-hal serupa sudah diidap dalam kadar tertentu baik sebelum berkenalan dengan narkoba lalu dipicu oleh orang-orang sekitar atau keadaan buruk dan gawat lingkungan setempat. Kemudian akan semakin parah bila ditambah oleh narkoba yang dipakai. Karena itu, rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pemakai, melainkan memulihkan serta menyetatkan seseorang secara utuh dan menyeluruh.

Rehabilitasi korban narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. “ Penyakit narkoba “ memang khusus sifatnya selalu meninggalkan trauma yang amat mendalam rasa ketagihan mental maupun fisik.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika, Rehabilitasi Medis adalah “suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Rehabilitasi Sosial adalah ”suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Menurut KEPMENKES 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkoba. Rehabilitasi adalah ”Upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna narkoba yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin”.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto rehabilitasi berarti suatu proses atau tehnik mendidik serta mengarahkan kembali sikap dan motivasi pelanggar, sehingga perilakunya sesuai lagi dengan aturan-aturan kemasyarakatan. (Soerjono Soekanto, 1982:99)

Program rehabilitasi berbeda-beda tergantung pada kasus-kasus tertentu. Memotivasi seorang pecandu secara rohani telah terbukti berguna dalam banyak kasus. Kadang-kadang obat lain sangat bermanfaat dan efektif untuk menghilangkan kecanduan dari narkoba lainnya. Pasien ini juga memerlukan dukungan emosional yang besar untuk keluar dari kecanduan mereka. Pecandu tidak boleh ditinggalkan sendirian dan selalu diminta tetap terlibat dengan orang lain. (<http://forum.kompas>, 2012).

Serangkaian program rehabilitasi yang diberikan kepada para penyalahguna dan pecandu Narkoba tentu akan membuat mereka menjadi lebih baik dan diharapkan bisa pulih dari ketergantungan pada Narkoba. Perpaduan rehabilitasi medis dan sosial juga menjadi padanan yang pas untuk mempersiapkan para penyalahguna dan pecandu Narkoba untuk kembali ke masyarakat dan hidup bebas dari Narkoba. Semakin banyak pecandu Narkoba yang pulih tentu impian menjadikan negara Indonesia yang bebas Narkoba pada masa datang akan terwujud. (Lina Febrianti, 2012: <http://edukasi.kompasiana>)

3. Penyalahgunaan Narkoba

a. Pengertian Narkoba

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum,

dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan(adiktif)fisik dan psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dinamika penggunaan narkoba dapat digambarkan, mula-mula dimulai dari merokok, lalu menggunakan obat, kemudian menggunakan obat secara salah (*misuse*), kemudian menyalahgunakan obat (*drug abuse*), kemudian terjadilah ketergantungan obat (*dependency*). Maka terjadilah masalah kesehatan fisik dan kesehatan mental. Selain dapat mencelakaan diri sendiri, dapat pula mencelakaan orang lain. Penyalahgunaan narkoba dapat dihubungkan dengan kecelakaan lalu lintas, risiko bunuh diri, kelahiran tak dikehendaki, dan kriminalitas. Pemakai narkoba variasinya berkisar dari hanya satu kali memakai sampai menggunakan terus menerus, selama beberapa tahun. (Anggadewi Moesono, Dkk : 2001)

b. Jenis-jenis Narkoba

Adapun jenis-jenis narkoba antara lain sebagai berikut :

- 1) Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.
- 2) Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. (Anggadewi Moesono, Dkk: 2001)

c. Dampak penyalahgunaan Narkoba

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1) Dampak Fisik:

- a) Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.

- b) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
- d) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- e) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- f) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
- g) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
- h) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- i) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan

tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

2) Dampak Psikis:

- a) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- b) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- c) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- d) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- e) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

3) Dampak Sosial:

- a) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b) Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- c) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

(Anggadewi Moesono, Dkk: 2001)

4. Kelembagaan

a. Fungsi lembaga

Lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Leopold Von Wiese dan Howard Becker melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut fungsinya, lembaga kemasyarakatan diartikannya sebagai suatu jaringan proses-proses

hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya. Sarana penanggulangan narkoba salah satunya adalah melalui lembaga masyarakat yang memang khusus bergerak di bidang penanggulangan narkoba. (Soerjono Soekanto, 1982: 198-199).

Adanya sebuah lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- 2) Menjaga keutuhan masyarakat
- 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social-control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Mereduksi dari fungsi di atas, nampaknya fungsi lembaga dalam masyarakat. Artinya setiap fungsi yang dijalankan oleh suatu lembaga, maka sejauh itu pulalah peranan dari lembaga sosial.

b. Proses pertumbuhan lembaga sosial

Di dalam proses pertumbuhan lembaga sosial ada sebuah norma dan sistem pengendalian sosial untuk masyarakat. Masyarakat merupakan sebuah wadah suatu kesatuan hidup manusia yang saling berhubungan antara satu sama lain, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas bersama menurut kebudayaannya. Masyarakat menciptakan kebudayaan dan kebudayaan tidak dapat di pisahkan dari masyarakat. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.

Adanya kebudayaan di dalam masyarakat diharapkan segenap anggota masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan pola-pola perilaku yang telah disepakati bersama. Di dalam kenyataannya tetap saja ada kepribadian dari anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap sesuatu yang telah disepakati bersama. Adanya pelanggaran terhadap sesuatu merupakan bukti bahwa ada suatu aturan yang berlaku di dalam masyarakat.

Norma memiliki kekuatan dan bersifat mengikat yang berbeda-beda kepada anggotanya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya pengertian.

a) Norma cara (*usage*)

Yaitu aturan yang menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan, suatu penyimpanan terhadap norma ini tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat. Antara lain seperti : dicela atau diperingatkan oleh yang bersangkutan.

b) Norma kebiasaan (*folkways*)

Norma ini mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dari pada norma cara. Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Sebagai contoh, kebiasaan memberi hormat kepada orang tua.

c) Norma tata kelakuan (*mores*)

Norma ini sangat penting memberikan batas-batas pada perilaku individu. Tata kelakuan juga merupakan alat yang memerintahkan sekaligus melarang seseorang anggota masyarakat melakukan suatu perbuatan. Bagi pelanggaran norma ini akan diberi sanksi yang berat oleh masyarakat.

d) Norma adat istiadat (*costum*)

Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan menderita sanksi yang keras oleh masyarakat. Bahkan masyarakat tidak akan mau menerima ia lagi. Dan norma ini merupakan norma yang sangat berpengaruh besar bagi perbuatan individu. (Muhammad Febriharning Wijaya, 2004 : 12)

Oleh karena itu norma memiliki fungsi sebagai alat pengerem dan pengendali, yang membatasi kebebasan individu dari perilaku-perilaku yang merugikan kepentingan bersama. Lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai yang sungguh-sungguh berlaku, apabila norma-normanya sepenuhnya membantu pelaksanaan pola-pola kemasyarakatan. Perilaku perseorangan yang dianggap sebagai peraturan merupakan hal sekunder bagi lembaga kemasyarakatan. Apabila manusia memahami norma-norma yang mengatur kehidupan bersamanya, maka akan muncul kecenderungan untuk mentaati norma-norma tersebut.

Selain adanya sebuah norma yang mengatur dalam kehidupan masyarakat, sebuah lembaga juga merupakan alat pengendalian sosial bagi masyarakat itu sendiri. Di dalam percakapan sehari-hari, sistem pengendalian sosial atau *social control* sering kali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintahan beserta aparturnya.

Jadi pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lain (misalnya seorang ibu mendidik anak-anaknya agar menyesuaikan diri pada kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku) atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial (umpamanya, seorang dosen pada perguruan tinggi memimpin mahasiswa di dalam kuliah-kuliah kerja). Seterusnya pengendalian sosial dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap

individu. Itu semuanya merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, walau seringkali manusia tidak menyadari.

Alat-alat yang biasa digunakan untuk melaksanakan pengendalian sosial beraneka ragam. Pendidikan baik disekolah maupun diluar sekolah, merupakan salah satu alat pengendalian sosial yang telah melembaga baik pada masyarakat bersahaja maupun pengendalian sosial yang biasanya dianggap paling ampuh, karena lazimnya disertai dengan sanksi tegas yang berwujud penderitaan dan dianggap sebagai sarana formal. (Muhammad Febriharning Wijaya : 2004)

c. Tipe-tipe lembaga sosial

Adapun tipe-tipe lembaga kemasyarakatan, dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut. Menurut Gillin dan Gillin, lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) *Crescive institutions* dan *enacted institutions* yang merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. *Crescive institutions* yang juga disebut juga lembaga-lembaga paling primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tak di sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya adalah hak milik, perkawinan, agama dan seterusnya. *Enacted institutions* dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya

lembaga utang piutang, lembaga perdagangan dan lembaga-lembaga pendidikan, yang kesemuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat.

- b) Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atau *Basic institutions* dan *subsidiary institutions*. *Basic institutions* dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, misalnya keluarga, sekolah-sekolah, negara dan lain sebagainya dianggap sebagai *basic institutions* yang pokok. Sebaliknya adalah *subsidiary institutions* yang dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi.
- c) Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan *approved* atau *social sanctioned-institutions* dengan *unsanctioned institutions*, adalah lembaga-lembaga yang menerima masyarakat seperti misalnya sekolah, perusahaan dagang dan lain-lain. Sebaliknya adalah *unsanctioned institutions* yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. Misalnya kelompok penjahat, pemeras, pencoleng dan sebagainya.
- d) Perbedaan antara *general institutions* dengan *restricted institutions*, timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada faktor penyebarannya. Misalnya agama merupakan suatu *general*

institutions, karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Sedangkan agama-agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha dan lain-lainnya, merupakan *restriced institutions*, oleh karena di anut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini.

- e) Sudut fungsinya terdapat perbedaan *operative institutions* dan *regulative institutions*. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti misalnya lembaga industrialisasi. Yang kedua bertujuan menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Suatu contoh adalah lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan dan sebagainya.

Klasifikasi tipe-tipe lembaga kemasyarakatan tersebut, menunjukkan bahwa di dalam setiap masyarakat akan dijumpai bermacam-macam lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai yang menentukan lembaga kemasyarakatan manakah yang dianggap sebagai pusat dan yang kemudian dianggap berada di atas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Begitupun adanya sebuah lembaga Pantia Sosial Pamardi Putra Yogyakarta merupakan salah satu wujud dari sebuah lembaga sosial berdasarkan fungsinya yaitu lembaga sosial yang berfungsi untuk mengendalikan dan menanggulangi korban penyalahgunaan narkoba. Dan

bagaimanapun juga lembaga ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta

Sebagai kota pelajar, kota budaya dan kota pariwisata, D.I. Yogyakarta menjadi daerah yang sangat dinamis, multikultural, kompleks dan menjadi hunian yang nyaman bagi semua orang dengan segala perbedaan latarbelakang dan karakteristiknya (umur, tingkat pendidikan, budaya, status sosial-ekonomi, agama, suku bangsa). Sebagai kota yang bisa disebut sebagai muara dari berbagai perbedaan tersebut, beragam gesekan dan permasalahan dalam relasi interpersonal atau relasi sosial adalah niscaya adanya. Terutama dalam era globalisasi sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dibarengi dengan kesadaran dan tanggungjawab sosial kemasyarakatan, akan menimbulkan permasalahan dan bahkan kejahatan intelektual. Belum lagi, dengan serbuan informasi serta masifnya pengadopsian nilai-nilai dan budaya Barat dengan tanpa mengindahkan pijakan nilai dan identitas diri, menimbulkan krisis identitas yang berbanding lurus dengan usaha pemberdayaan diri kepada lingkungan atau komunitas masyarakat.

Dengan adanya dampak era globalisasi dan banyaknya pendatang dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara yang menuntut ilmu dengan latarbelakang sosial yang berbeda-beda,

menyebabkan Propinsi D.I Yogyakarta sangat rawan terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba.

Dalam rangka menekan laju penyalahgunaan narkoba, maka Propinsi D.I Yogyakarta sejak tahun 2003 atas prakarsa Gubernur didirikan Panti Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba yaitu, Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) "Sehat Mandiri" di Purwamartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta yang mulai operasional tahun 2004 dan pada tahun 2009 diresmikan menjadi Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta. (Dokumen PSPP Yogyakarta, 2007)

B. Penelitian Yang Relevan

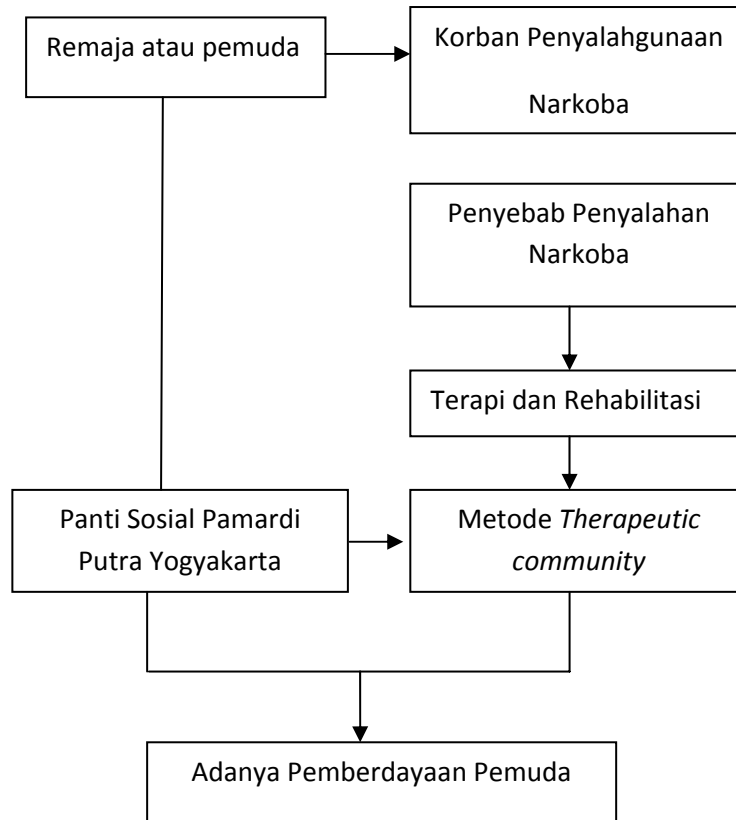
Penelitian relevan yang sudah dilaksanakan oleh Purwanti Widyaningrum dengan judul " Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja dan Pola Pembinaannya di Pondok Pesantren Al Islamy Kecamatan Kali Bawang, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta ". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika pada sepuluh remaja adalah : MLN yaitu ingin coba-coba dan pengaruh lingkungan, IGN yaitu pelarian dan broken home, NNG yaitu iseng atau coba-coba dan pengaruh lingkungannya, ANY yaitu frustrasi dan broken home, HRY yaitu tekanan kelompok pergaulan, YN yaitu paksaan, PWT yaitu untuk menunjukkan solidaritas pada kawan, YTH yaitu jenuh atau bosan, kesepian dan

lingkungan pergaulan, AMN yaitu kekecewaan, jenuh atau bosan dan broken home, BM yaitu iseng atau coba-coba dan mencari kenikmatan. Tahap-tahap pembinaan yang dilakukan meliputi : Tahap pengenalan (pengenalan secara umum peranan pondok pesantren), tahap awal pembinaan meliputi: pendaftaran dan konsultasi, tahap penyadaran dan pembinaan meliputi : mandi (*hydroterapi*), sholat, dzikir, (jamar dan khofi), puasa, bimbingan konseling dan olahraga dan tahap akhir meliputi pemberian nasehat dari kyai. Adapun faktor pendukung pelaksanaan pembinaan meliputi : suasana tempat yang tenang (jauh dari keramaian kota), sistem kekeluargaan yang diterapkan, kemauan yang kuat dari pasien untuk sembuh dan kerjasama yang baik antara pihak pondok dengan keluarga. Faktor penghambatnya adalah terbatasnya sumber dana dan kurangnya kerjasama dengan instansi terkait (Departemen Sosial dan Dinas Kesehatan).

Penelitian di atas dinilai relevan dengan penelitian ini, karena sama-sama mengkaji tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja atau pemuda, tetapi untuk penelitian ini lebih di tekankan pada pemberdayaan pemuda melalui proses rehabilitasi. Penelitian ini akan diadakan di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta.

C. Kerangka Berpikir

Bagan kerangka berfikir untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan bagan kerangka berfikir di atas, maka kerangka berfikir dapat diuraikan sebagai berikut :

Pemuda adalah golongan manusia-manusia muda yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah yang lebih baik, agar dapat melanjutkan dan mengisi pengembangan yang kini telah berlangsung. Pemuda Indonesia dewasa ini sangat beraneka ragam, terutama bila dikaitkan dengan kesempatan pendidikan. Keragaman tersebut pada dasarnya tidak

mengakibatkan perbedaan dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda.

Dalam kehidupannya, remaja atau pemuda mengalami banyak masalah diantaranya masalah dengan keluarga atau dengan lingkungannya sampai akhirnya remaja tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga remaja tersebut mencoba menggunakan narkoba untuk menenangkan dirinya dan untuk membuat percaya diri kepada keluarganya atau lingkungannya, terlebih tanpa diperhatikan oleh orang tuannya pemuda tersebut terjerumus menggunakan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu masalah sosial yang ada di masyarakat yang harus ditangani secara serius, karena dampak pada penggunaan narkoba sangat berbahaya bagi diri pengguna maupun masyarakat sekitar. Korban penyalahgunaan narkoba akan sangat berbahaya jika dibiarkan begitu saja karena korban penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi masyarakat atau manusia lain untuk menggunakan narkoba. Selain itu juga dapat melakukan kegiatan kriminal pada saat korban mengalami sakau. Karena pada dasarnya korban penyalahgunaan narkoba sebenarnya sudah tidak dapat berfikir jernih lagi karena efek dari narkoba tersebut.

Dalam hal ini sebuah lembaga sosial yang menangani para pengguna narkoba khususnya para remaja memberikan terapi atau rehabilitasi di sebuah lembaga yang menangani para pengguna narkoba dilingkungan masyarakat karena keberadaan lembaga ini sangat dibutuhkan masyarakat karena dapat

memberikan pegangan kepada masyarakat untuk dapat memberdayakan pemuda khususnya pemuda yang yang menyalahgunakan narkoba.

Salah satu desa yang berada di Kabupaten Sleman, tepatnya desa Karangmojo, Purwamartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sebuah lembaga sosial bernama Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta. Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta adalah sebuah panti sosial yang didirikan khusus untuk menangani korban penyalahgunaan narkoba yang berjenis kelamin laki-laki yang mayoritas pesertanya adalah para remaja atau pemuda. seluruh rangkaian proses terapi dan rehabilitasi yang ada di lembaga panti sosial pamardi putra Yogyakarta menggunakan metode *Therapeutic Community(TC)* bertujuan untuk dapat memberdayaan pemuda dan terciptanya generasi muda yang terbebas dari narkoba.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana upaya dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda melalui proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Lembaga Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan pemuda melalui proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di lembaga Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.